

SINKRONISASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP PERATURAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI



Oleh :

Muhammad Yahya Arief
NPM. 19810444

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2023

ABSTRAK

Muhammad Yahya Arief, NPM 19810444, "SINKRONISASI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP", Skripsi 2023, Dr. H. Hidayatullah, S.HI.,S.Pd., M.H., M.Pd, Dr.Muhammad Aini, S.HI., M.H.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan lingkungan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya berkaitan dengan lingkungan hidup serta untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan lingkungan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya berkaitan dengan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara keberadaannya mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Meskipun undang—undang ini mengatur tentang Ibu Kota Negara, namun undang-undang ini juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup secara jelas dan rinci. Pengaturan lingkungan hidup dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti: Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sinkronisasi, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Lingkungan Hidup*

Daftar Pustaka

- Ahmad Gelora Mahardika, dan Rizky Saputra, "*Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,
- Bagir Manan, 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta.
-,1997, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta,
- CNBC Indonesia, 2019. *Pemindahan Ibukota Baru Indonesia*.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media,,
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media,
- Septi Nurwijayanti, dan Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
- S.E. Finer, dalam S.Pamudji, 1998, *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Bina Aksara,
- Purnasi Purba caraka dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 15
- Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun*

2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya

Sri Hajati, dkk. 2018 Pengantar Hukum Indonesia, Airlangga University Press: Surabaya.

Syaukani, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid, 2007, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jakarta: Pustaka Pelajar,

S.Pamudji, 1981, *Teori sistem dan penerapannya dalam manajemen*, Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 4

Tuziadah. (2013). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang:

Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik. *Jurnal Legislasi Indonesia*

Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers

H.M Yahya, 'Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera', *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 14, No 01, Juni 2018, p. 21-30, h 25.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 10 Tahun 1964, tentang tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Lingkungan Hidup

Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190925173229-4-102224/terungkap-alasan-jokowi-pilih-daerah-kaltimjadi-ibu-kota> Diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 19:08 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/14515641/453-persen-responden-survei-tolak-pemindahan-ibu-kota-ini-alasannya>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, pukul 10:03 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190826130641-32-424671/mengenal-penajam-paserutara-dan-kukar-ibu-kota-baru-ri>>

<http://fh.unram.ac.id>, diakses pada tanggal 4 Mei 2023

<https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara," *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, no. 1 (2022): 1-10